

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah daerah merupakan organisasi yang menjalankan roda pemerintahan suatu daerah yang berupa pelayanan jasa yang efektif dan efisien sesuai dengan kinerja manajerial untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengukuran kinerja diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi serta efektifitas organisasi publik. Lembaga-lembaga publik diharapkan memiliki kinerja yang baik, yang ditunjukkan dengan akuntabilitas lembaga terhadap sumber daya publik yang dikelolanya. Peningkatan kinerja manajerial yang baik dengan melaksanakan fungsi manajemen organisasi, salah satunya adalah partisipasi anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas anggaran agar kegiatan operasi berjalan dengan baik dan mencapai tujuan organisasi.

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari badan pemeriksaan keuangan. Pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana.

Dalam suatu organisasi maupun pemerintahan pasti memiliki anggaran. Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun organisasi sektor publik. Anggaran merupakan rencana kegiatan yang mencakup berbagai jenis kegiatan operasional yang saling berkaitan satu sama lain dalam sebuah organisasi. Anggaran yang disusun hendaknya dapat mengakomodir kepentingan setiap departemen atau divisi yang terkait dalam pelaksanaannya. Partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran merupakan proses pengambilan keputusan bersama oleh kedua bagian atau lebih, dimana keputusan tersebut memiliki dampak masa depan terhadap organisasi.

Akuntansi pertanggungjawaban disini berperan sebagai tolak ukur apakah anggaran yang telah diukur secara partisipatif antara atasan dan bawahan tadi berjalan dengan baik atau terdapat penyimpangan. Jika sistem berjalan dengan baik maka akuntansi pertanggungjawaban akan berperan aktif dalam membantu manajemen perusahaan untuk memberikan kontribusi penyusunan anggaran serta menilai kinerja dari setiap pusat pertanggungjawaban dalam rangka pengambilan keputusan serta mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Akuntansi pertanggungjawaban akan memudahkan pimpinan instansi untuk mengendalikan pekerjaan bawahannya dan dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja selama periode anggaran terjadi, karena pimpinan instansi tidak dapat mengendalikan pekerjaan bawahannya secara langsung.

Tahap setelah operasionalisasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban adalah penilaian kinerja instansi organisasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik. Kinerja instansi adalah hasil dari proses aktivitas yang efektif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, laporan

pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan. Kinerja yang baik pasti akan menghasilkan aktivitas kerja yang baik dan berdaya guna lebih. Tolak ukur untuk suatu kinerja dikatakan baik apabila mampu memenuhi fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Hubungan antara partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban dengan kinerja manajerial sangat erat kaitannya, sebagaimana manajer atau kepala bidang dalam proses penyusunan atau partisipasi anggaran akan merencanakan suatu kegiatan operasi organisasi, baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang dengan kegiatan yang efektif serta biaya yang efisien, hasil setiap unit organisasi akan dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban untuk memberikan pernyataan tentang kebenaran dan kelayakan laporan tersebut yang kemudian akan dijadikan penilaian dalam kinerja manajerial.

Contoh kasus yang banyak terjadi yaitu salah satunya tentang dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum Mikael Kambuaya dan Komisaris PT Manbers Jaya Mandiri David Manibui. Mereka terdakwa kasus dugaan korupsi terkait pekerjaan peningkatan Jalan Kemiri-Depapre Tahun Anggaran 2015. Jaksa menganggap Kambuaya dan Manibui telah merugikan negara sebesar Rp. 40,93 Miliar sebagaimana laporan badan pemeriksaan keuangan pada Mei 2019. Kerugian itu timbul karena keduanya melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak mendukung upaya pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (kompas.com).

Penelitian mengenai kinerja manajerial pun telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Aini (2018) hasil pengujian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan partisipasi anggaran

( $X_1$ ) dan akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap kinerja manajerial (Y). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yuliasuti (2016), hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial (Y), dan akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap kinerja manajerial (Y), Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lubis dan Suzan (2016) yang berjudul Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada PT. Perkebunan Sumatera Utara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial (Y) di PT. Perkebunan Sumatera Utara.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sama. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja manajerial Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo?
2. Apakah akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan pembaca mengenai hubungan partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial. Serta diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial dan sejauh mana peran yang diberikan partisipasi anggaran serta akuntansi pertanggungjawaban pada instansi.
2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum, sebagai bahan masukan untuk instansi khususnya tentang pengaruh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial, dapat menjadi

pertimbangan bagi pihak manajemen dalam pembuatan anggaran dan pengambilan keputusan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi sumber referensi dalam ilmu akuntansi, khususnya mengenai kinerja manajerial yang dapat dinilai berdasarkan partisipatif anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban.

### **1.5 Ruang Lingkup Dan Batasan Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian ini pada variabel bebas yaitu Partisipasi Anggaran ( $X_1$ ) Dan Akuntansi Pertanggungjawaban ( $X_2$ ), Sementara Variabel Terikatnya Adalah Kinerja Manajerial ( $Y$ ).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **Teori Penetapan Tujuan (*Goal-Setting Theory*)**

Penelitian ini menggunakan *goal-setting theory* yang dikemukakan oleh Locke (1968) sebagai teori utama (*grand theory*). *Goal-setting theory* merupakan salah satu bentuk teori motivasi. *Goal-setting theory* menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasarnya yaitu seseorang yang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kinerjanya. Jika seorang individu memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, maka komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya.

Capaian atas sasaran (tujuan) yang ditetapkan dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Secara keseluruhan, niat dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan, merupakan motivasi yang kuat dalam mewujudkan kinerjanya. Individu harus mempunyai keterampilan, mempunyai tujuan dan menerima umpan balik untuk menilai kinerjanya. Capaian atas sasaran (tujuan) mempunyai pengaruh terhadap perilaku pegawai dan kinerja dalam organisasi (Lunenburg, 2011). Setiap organisasi yang telah menetapkan sasaran (*goal*) yang diformulasikan ke dalam rencana anggaran lebih mudah untuk mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Sebuah anggaran tidak hanya sekedar mengandung rencana

dan jumlah nominal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan atau program, tetapi juga mengandung sasaran yang ingin dicapai organisasi.

## **2.2 Partisipasi Anggaran**

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis (PP No. 24 tahun 2005). Partisipasi anggaran merupakan hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan bersama oleh dua atau lebih pihak, dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap organisasi. Oleh karena itu, partisipasi anggaran yang baik adalah yang melibatkan atasan dan bawahan di dalam organisasi agar tidak terjadi partisipasi semu.

Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran merupakan bentuk nyata keterlibatan seorang individu yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja manajerial individu tersebut. Saat seseorang individu terlibat aktif dalam proses penyusunan anggaran artinya individu tersebut termotivasi dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai upaya maksimal untuk mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam penyusunan anggaran lebih memungkinkan bagi bawahan untuk melakukan negoisasi mengenai atasannya bahkan mampu mempengaruhi target anggaran yang ingin mereka peroleh. Anggaran yang berhasil dicapai mencerminkan keberhasilan individu. Semakin tinggi partisipasi dalam proses penyusunan anggaran maka semakin tinggi pula kinerja manajerial yang dicapai.

Beberapa ahli berpendapat mengenai partisipasi anggaran salah satunya Menurut Ningsih (2017) “Partisipasi anggaran adalah

keterlibatan manajer dan bawahan dalam proses penganggaran. Partisipasi dalam pengaturan anggaran dapat menginspirasi manajer atau kepala”. Menurut Supirno (2014:122) “Partisipasi anggaran adalah pendekatan yang secara umum dapat meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi untuk menyeleraskan tujuan setiap bagian dalam organisasi secara keseluruhan, dengan harapan sesuai dengan organisasi”. Menurut Tanase (2013) menyebutkan bahwa anggaran merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mendukung entitas ekonomi dalam melaksanakan kegiatan.

### **2.2.1 Keunggulan Partisipasi Anggaran**

Partisipasi dalam penyusunan anggaran sangat menguntungkan dalam pemutusan tanggungjawab dalam pelaksanaan dinamis dan dalam lingkungan yang tidak pasti. Garrison et al (2013:384) menyatakan keunggulan anggaran partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang pada tingkatan organisasi diakui sebagai anggota tim yang pandangan dan penilaiannya dihargai oleh manajemen puncak.
- b. Estimasi anggaran yang dibuat oleh manajer sering kali lebih akurat dan andal dibandingkan dengan estimasi yang dibuat oleh manajer puncak yang kurang memiliki pengetahuan mendalam mengenai pasar dan operasi sehari-hari.
- c. Timbul motivasi yang lebih tinggi bila individu berpartisipasi dalam menentukan tujuan mereka sendiri, dibandingkan bila tujuan tersebut ditetapkan dari atas. Anggaran yang ditetapkan sendiri menciptakan adanya komitmen.
- d. Seorang manajer tidak memenuhi anggaran yang ditetapkan dari atas selalu berkata bahwa anggaran tersebut tidak realistis dan tidak mungkin untuk

dicapai. Dengan anggaran yang ditetapkan sendiri, alasan semacam itu tidak akan timbul.

### **2.2.2 Kelemahan Partisipasi Anggaran**

Adapun potensi masalah yang menjadi kelemahan dalam partisipasi anggaran sebagai berikut:

- a. Menetapkan standar yang selalu tinggi atau terlalu rendah, sejak yang dianggarkan menjadi tujuan manajer.
- b. Membuat kelonggaran dalam anggaran (sehingga disebut sebagai menutup anggaran), dimana muncul ketika seorang manajer memperkirakan pendapatan rendah atau meninggikan biaya dengan sengaja.
- c. Perbedaan antara jumlah sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk menyelesaikan tugas secara efisien dengan jumlah yang diajukan oleh manajer yang bersangkutan untuk mengerjakan tugas yang sama.
- d. Melibatkan banyak pihak dalam penyusunan anggaran sehingga secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang menghambat proses pelaksanaan anggaran.
- e. Partisipasi semu, yang artinya bahwa perusahaan menggunakan partisipasi anggaran dalam penyusunan anggaran padahal sebenarnya tidak. Dimana, bawahan terpaksa menyatakan persetujuan terhadap keputusan yang akan diterapkan.

Masalah-masalah tersebut harus menjadi perhatian bagi kepala instansi agar kemungkinan untuk terjadi dapat diminimalisir. Penetapan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat diatasi dengan mengajak para manajer berpartisipasi dalam menentukan target anggaran yang tinggi tetapi realistis untuk

dicapai. Manajer puncak harus memeriksa kembali anggaran yang diusulkan bawahannya secara seksama serta memberikan masukan.

### **2.3 Akuntansi Pertanggungjawaban**

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu proses pengumpulan dan pencatatan serta penyajian laporan atas transaksi ataupun data keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Laporan yang disajikan dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam memperoleh informasi yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya sebagai ukuran kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan tahap perkembangan mutlak yang berisi cara pengendalian biaya produk dan non-produksi. Dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban, informasi akuntansi dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang terjadinya informasi tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan. Pertanggungjawaban manajer tersebut terkait dengan wewenang yang dimiliki untuk dapat mengendalikan sesuatu yang berada dibawah wewenangnya, diantaranya aktiva, pendapatan, dan biaya.

Pengertian akuntansi pertanggungjawaban menurut Rudianto (2013:176) mendefinisikan akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut:”Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu system akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban kepada seluruh organisasi itu dan mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat pertanggungjawaban itu dengan menetapkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggungjawab tersebut”. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen dalam bukunya akuntansi manajerial

(2012:116), mendefinisikan “Akuntansi pertanggungjawaban sebagai sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pertanggungjawaban menurut informasi yang ditentukan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka”.

Dengan demikian akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang telah dicapai oleh setiap pertanggungjawaban menurut informasi yang telah ditentukan oleh para manajer.

### **2.3.1 Fungsi Akuntansi Pertanggungjawaban**

Akuntansi pertanggungjawaban menurut fungsinya adalah sebagai alat penilaian kinerja dan memberikan atau menghasilkan arus balik sehingga operasi diwaktu yang akan datang dapat ditingkatkan.

#### **a. Penilaian Kinerja Pusat Pendapatan**

Informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pusat pendapatan adalah pendapatan. Untuk pengukuran kinerja pusat pendapatan seluruh pendapatan baik yang berasal dari transaksi penjualan produk atau jasa kepada pusat pertanggungjawaban lain dalam perusahaan, dipakai sebagai tolak ukur kinerja pusat pendapatan.

#### **b. Penilaian Kinerja Pusat Biaya**

Informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja manajer pusat biaya adalah biaya. Masalah yang timbul dalam penggunaan biaya sebagai ukuran kinerja manajer pusat biaya adalah:

1. Masalah perilaku biaya
2. Masalah hubungan biaya dengan pusat biaya
3. Masalah jangka waktu

#### 4. Masalah tanggungjawab ganda

##### c. Penilaian Kinerja Pusat Laba

Pusat laba adalah pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan perusahaan dan biaya pusat pertanggungjawaban tersebut. Karena laba merupakan selisih antara pendapatan dan biaya, tidak dapat berdiri sendiri sebagai ukuran kinerja pusat laba, maka laba perlu dihubungkan dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut.

##### d. Penilaian Kinerja Pusat Investasi

Pusat investasi merupakan salah satu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang manajernya dinilai prestasinya atas dasar laba yang diperoleh dihubungkan dengan investasinya.

### **2.3.2 Jenis-Jenis Pusat Pertanggungjawaban**

Pusat pertanggungjawaban merupakan salah satu elemen dari suatu struktur sistem pengendalian manajemen. Pusat pertanggungjawaban adalah organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas aktivitas yang dilakukan". Menurut Anthony dan Govindarajan (2009:175) ada empat jenis pusat pertanggungjawaban untuk tujuan pengendalian yaitu:

#### a. Pusat Pendapatan

Suatu output (pendapatan) diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input (beban atau biaya) dengan output. Pada umumnya, pusat pendapatan merupakan unit pemasaran atau penjualan yang tidak memiliki wewenang untuk menetapkan harga jual dan

tidak bertanggungjawab atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka pasarkan.

b. Pusat Biaya

Merupakan suatu pertanggungjawaban yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Pusat biaya, manajer departemen atau divisi diserahi tanggungjawab untuk mengendalikan biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Pusat biaya merupakan jenis pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Hal ini karena bidang-bidang dimana manajer mempunyai tanggungjawab dan otoritas atas biaya dapat diidentifikasi dengan cepat pada sebagian besar perusahaan.

c. Pusat Laba

Ketika kinerja finansial suatu pertanggungjawaban diukur dalam ruang lingkup laba (selisih antara pendapatan dan biaya), maka pusat ini disebut sebagai pusat laba. Laba merupakan ukuran kerja yang berguna karena laba memungkinkan manajer senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif, dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator (beberapa diantaranya menunjuk kearah yang berbeda). Manajer pusat laba diukur kinerjanya dari selisih antara pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatn tersebut.

d. Pusat Investasi

Pusat investasi bertanggungjawab terhadap investasi dalam asset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Mereka bertanggungjawab mencapai

margin kontribusi dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan asset.

Jadi pusat pertanggungjawaban adalah bagian organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab atas aktivitas operasional yang dipimpinnya.

## **2.4 Kinerja Manajerial**

### **2.4.1 Pengertian Kinerja Manajerial**

Kinerja Manajerial merupakan “kemampuan para manajer untuk mengolah seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan demi memperoleh dana usaha dalam jangka pendek dan jangka panjang”, menurut Mahoney *et al.* (1963) dalam Natalia (2016:16) mendefinisikan kinerja manajerial sebagai “kecakapan manajerial dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu: perencanaan, investasi, koordinasi, pengawasan (Supervisi), pengaturan staff, negosiasi dan perwakilan”.

Pengukuran kinerja terhadap manajer organisasi sektor publik sangat penting baik bagi pihak yang memberi amanah (masyarakat) maupun yang diberi amanah. Bagi pemberi amanah, pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai kinerja para manajer sektor publik, apakah mereka telah menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diamanahkan atau tidak (Mahsun *et al.*, 2015: 146).

Sedangkan untuk yang diberi amanah pengukuran dapat digunakan sebagai media untuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah dipercayakan kepada mereka. Selain itu juga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi mereka untuk mengetahui seberapa jauh presentasi yang mereka raih (Mahsun *et al.*, 2015: 146).

## **2.4.2 Tujuan Penelitian Kinerja Manajerial**

Pengertian tujuan penelitian kinerja menurut Rivai Veithzal (2011:40) adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja setiap individu. Ketika seseorang berfikir tentang penilaian kinerja, maka sering merujuk pada tujuan yang lebih spesifik diantaranya :

- a. Untuk meninjau kembali kinerja yang lalu.
- b. Untuk membantu pengembangan individu.
- c. Untuk mengetahui kondisi perusahaan saat ini, untuk digunakan penentuan kebijakan yang akan datang.
- d. Untuk pengembangan perusahaan (menutup atau membuka cabang, perwakilan, atau kantor baru didaerah).
- e. Untuk mempersiapkan menghadapi kompetensi yang semakin ketat, termasuk karena tujuan menciptakan produk baru atau memasarkan produk baru.
- f. Untuk mengaudit keterampilan (*skills*) didalam organisasi.
- g. Untuk menyusun sasaran-sasaran kinerja yang akan datang.

## **2.5 Hubungan Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial**

### **2.5.1 Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Manajerial**

Keaktifan seorang kepala bidang dalam suatu organisasi dapat diukur dengan partisipasinya dalam kegiatan organisasinya. Salah satu pengukuran kinerjanya dapat diukur melalui partisipasinya dalam penyusunan anggaran. Kepala bidang yang berperan aktif dalam proses penyusunan anggaran dapat memberikan dampak yang positif dalam proses penyusunan anggaran. Kepala bidang yang memiliki rasa loyalitas terhadap instansi akan mempertimbangkan sasaran instansi yang sudah ditetapkan. Partisipasi anggaran dapat memiliki hubungan yang erat

dengan kinerja manajerial apabila kepala bidang dapat secara positif dan baik dalam merencanakan susunan anggarannya. Pengendalian biaya serta pertimbangan efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran sangat diperlukan agar dalam realisasinya dapat sesuai dengan apa yang diharapkan. Medhayanti dan Suardana (2015) mengungkapkan bahwa banyak instansi menyakini bahwa anggaran mampu meningkatkan kinerja. Terciptanya kinerja manajerial yang baik dapat terwujud jika manajer dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mencapai sasarnya.

### **2.5.2 Hubungan Antara Akuntansi Pertanggungjawaban Dengan Kinerja Manajerial**

Penerapan dalam sistem pengendalian manajemen yang baik akan mendukung aktivitas organisasi. Pengendalian dalam menilai serta mengevaluasi aktivitas instansi juga bisa dikendalikan melalui sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan bentuknya suatu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dapat membantu kepala bidang dalam memberikan evaluasi mengenai realisasi anggaran dan rencana kerja instansi secara jelas. Tanggungjawab seorang kepala bidang akan sangat diperlukan dalam penyusunan anggaran serta rencana kerja instansi. Akuntansi pertanggungjawaban memiliki hubungan yang erat dengan kinerja manajerial dari sisi pengawasan, keandalan, kejelasan dan tanggungjawab dari keputusan yang dibuat oleh kepala bidang. Semakin baik penerapan akuntansi pertanggungjawaban maka keefektifitasan pengendalian biaya akan mengalami peningkatan, sebaliknya jika semakin buruk penerapan akuntansi pertanggungjawaban maka keefektifitasan pengendalian biaya akan mengalami penurunan (Wirasedana, 2013:571).

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Konsep dasar atau acuan yang berupa teori-teori serta temuan-temuan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal penting yang dapat memberikan penjelasan pendukung. Penelitian terdahulu merupakan salah satu alat pendukung dari sebuah penelitian yang memberikan informasi mengenai apa yang diteliti serta mampu mendukung teori serta konsep-konsep yang dapat digunakan dalam sebuah penelitian. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, berikut beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2019) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Partisipasi anggaran dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja manajerial.

Penelitian yang dilakukan oleh Aini (2018) yang Berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Pasuruan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada dinas pertanian dan ketahanan pangan di pasuruan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudhita (2018) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero). Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa secara parsial variabel partisipasi anggaran dan variabel akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Secara simultan variabel partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2018) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Motivasi Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada ODP Kota Magelang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, sedangkan motivasi berpengaruh negative terhadap kinerja manajerial.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernis dan Wardayati (2017) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Motivasi. Hasil penelitian ini menunjukkan partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Partisipasi anggaran juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dan motivasi. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa komitmen organisasi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini juga membuktikan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial melalui komitmen organisasi dan motivasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Angkawijaya dan Haryo (2016) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. Sigma Steel Bandung. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial.

Penelitian yang dilakukan oleh Natalya dan Kusumawardani (2016) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Balikpapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

Penelitian yang dilakukan oleh Medhayanti dan Suardana (2015) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan *Self Efficacy*, Desentralisasi, Dan Budaya Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial serta *self efficacy*, desentralisasi, dan budaya organisasi mampu memperkuat hubungan keduanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Febrian (2015) hasil pengujian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran ( $X_1$ ) dan akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial ( $Y$ ). Namun, secara parsial hanya akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) yang berpengaruh terhadap kinerja manajerial ( $Y$ ).

Penelitian yang dilakukan oleh Andriana dan Balqis (2015) yang berjudul Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Kinerja Manajerial Pusat Pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara akuntansi pertanggungjawaban dengan kinerja manajerial pusat pertanggungjawaban yaitu sebesar 0,831 dengan daya determinasi sebesar 69,

06%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban mempunyai pengaruh sebesar 69, 06% dalam kinerja manajerial pusat pertanggungjawaban dengan sisanya sebesar 30, 94% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Amril (2014) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT. Pos Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara simultan terhadap kinerja manajerial, partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, akuntansi pertanggungjawaban memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial, partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban memiliki pengaruh yang sedang terhadap kinerja manajerial.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Pusat Biaya Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh positif terhadap

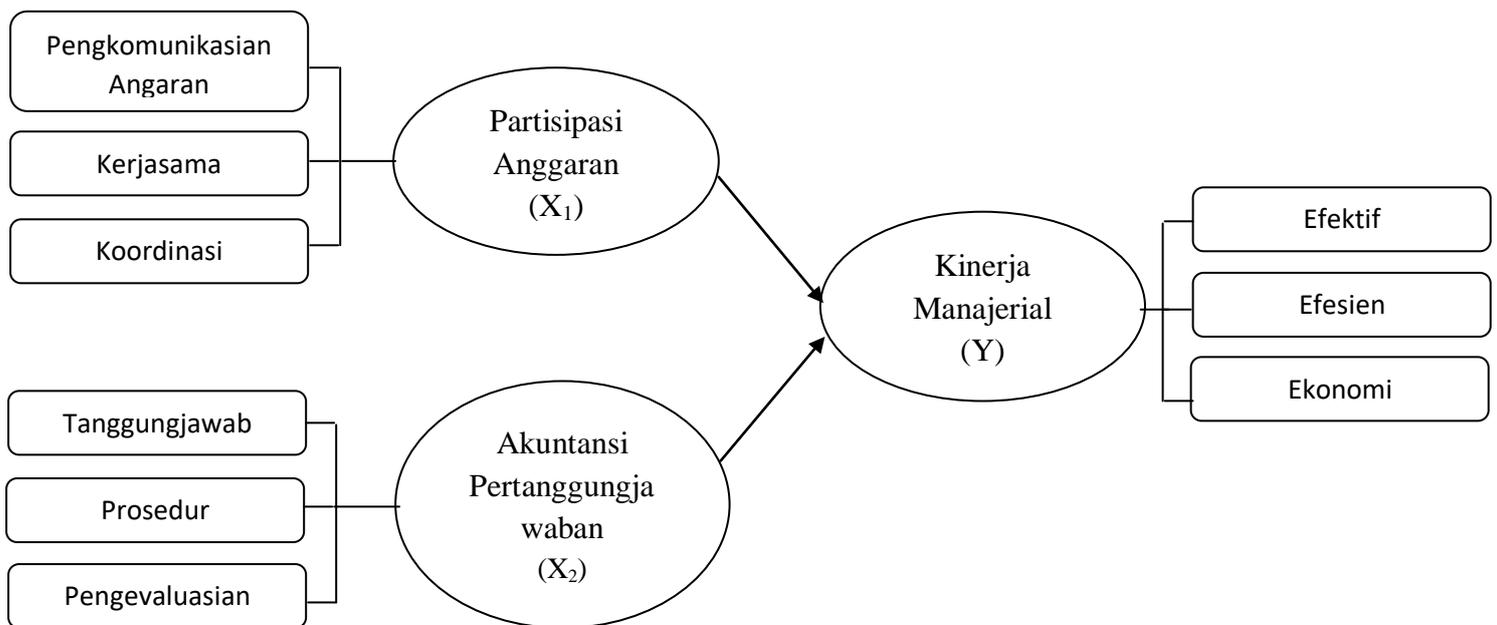
kinerja manajerial, akuntansi pertanggungjawaban pada pusat biaya berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sedangkan secara simultan kedua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap variabel terikat.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramesthningtyas (2011) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial, Melalui Komitmen Organisasi dan Motivasi Sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung antara partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Partisipasi anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi dan motivasi.

## **2.7 Kerangka konseptual**

Kerangka konseptual menurut Notoatmodjo (2012:49), adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas terkait dengan hubungan antara variabel independen dan dependen, berikut adalah model dari kerangka konseptual penelitian :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



## 2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Diduga Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo.

H<sub>2</sub> : Diduga Akuntansi Pertanggungjawaban berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif kuantitatif. Menurut Sugiono (2012:7) “yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi positivis, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kauntitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data-data yang relavan dalam penelitian ini, peneliti mengadakan penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo yang beralamat di jalan Tobulung, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91958.

#### **3.3 Populasi Dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:80). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 73 karyawan yang bekerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo.

##### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2019:9). Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 73 pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo.

### **3.4 Jenis Data Dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera sehingga peneliti harus benar-benar jeli dan teliti untuk mendapatkan keakuratan data dari objek yang akan diteliti.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo yang berupa jawaban dari responden terhadap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner yang dibagikan pada seluruh pegawai. Adapun sumber data dari artikerl, jurnal, skripsi serta buku yang berkaitan dalam penelitian ini.

### **3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Untuk memudahkan dalam pengumpulan dan analisis data, maka diperlukan suatu definisi operasioanal variabel. Sugiyono (2016:38) menjelaskan secara teoritis bahwa variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan

obyek yang lain. Sedangkan variabel penelitian dijelaskan oleh Sugiyono (2016:38) yakni pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun definisi operasional dari variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **3.5.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)**

Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen merupakan faktor-faktor yang diamati guna menentukan pengaruh dari variabel bebas, yaitu faktor yang muncul atau berubah sesuai yang dijabarkan oleh peneliti. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial (Y). Menurut Rudianto (2013:189), “kinerja manajerial adalah kemampuan para manajer untuk mengolah seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan demi memperoleh dana usaha dalam jangka pendek dan jangka panjang”. Instrumen diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, dimana skor 1 (sangat tidak setuju) menunjukkan partisipasi rendah, skor 2 (tidak setuju), skor 3 (ragu-ragu), skor 4 (setuju) dan skor 5 (sangat setuju) menunjukkan partisipasi yang tinggi.

### **3.5.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)**

Variabel independen diartikan sebagai variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat), yaitu faktor-faktor yang dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi (Sugiyono 2016:39). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah partisipasi anggaran ( $X_1$ ), dan akuntansi pertanggungjawaban

(X<sub>2</sub>). Instrumen diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin, dimana skor 1 (sangat tidak setuju) menunjukkan partisipasi rendah, skor 2 (tidak setuju), skor 3 (ragu-ragu), skor 4 (setuju) dan skor 5 (sangat setuju) menunjukkan partisipasi yang tinggi.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dari peneliti ini adalah metode survei dengan kuesioner. Kuesioner adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden penelitian. Setiap jawaban pertanyaan diberikan skor sesuai dengan masing-masing skala pengukuran. Kegiatan pembagian kuesioner ini dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk mengkaji hipotesis yang telah diajukan” (Sugiyono, 2012:21). Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan regresi linear berganda dengan mengolah data menggunakan program SPSS Statistics 23. Berikut ini adalah pengujian-pengujian yang dilakukan dari hasil penelitian ini:

#### **3.7.1 Uji Kualitas Data**

##### **a. Uji Validitas**

Uji Validitas menurut Ghazali (2011:25) “uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika

pernyataan pada kuesioner yang mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut". Untuk dapat dikemukakan bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrument pengukuran maupun mengukur apa yang dilakukan.

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$ , dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dari hasil output (*Corrected Item Total Correlation*) dengan  $r_{tabel}$ . Total correlation dengan kriteria sebagai berikut: jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan nilainya positif, maka butir pertanyaan tersebut adalah valid, tetapi jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2011:25).

#### **b. Uji Realibilitas**

Uji ini digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal responden dari seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari hasil uji statistik *Cronbach Alpha*  $> 0,60$ . Semakin tinggi nilai Alphanya mendekati satu, maka nilai reabilitasnya semakin terpercaya.

#### **3.7.2 Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah di dalam model regresi tersebut terdapat suatu penyimpangan, sehingga perlu diadakan pemeriksaan dengan menggunakan pengujian normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah usaha untuk menentukan apakah data variabel yang kita miliki mendekati populasi distribusi normal atau tidak. Menurut Priyatno (2013:80) syarat dalam analisis parametrik yaitu distribusi data harus normal.

Untuk menguji model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada suatu diagonal dari grafik yang bersangkutan, yaitu Normal *P-PLOT*. Bila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normal. Bila data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas bisa juga menggunakan analisis statistik, yaitu dengan menggunakan uji Kolmogorov – smirnov (K-S). Apabila tingkat signifikan pada *Asymp Sig (2-tailed)* lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.

**b. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya kolerasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Uji ini juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara

yaitu dengan melihat *VIF* (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*, dan apabila  $VIF < 10$  dan nilai *tolerance*  $> 0,10$  maka terbebas gejala multikolinieritas (Ghozali, 2011:29)

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Heteroskedastisitas ditandai dengan adanya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk uji asumsi klasik hanya terbatas pada uji diatas. Uji autokorelasi tidak digunakan sebab pelaksanaan atau pembagian kuesioner dilakukan pada hari, waktu, dan tempat yang sama (serempak) atau dengan kata lain uji autokorelasi hanya digunakan untuk data penelitian yang berdimensi *time series*.

### 3.7.3 Uji Regresi Linier Berganda

Uji ini digunakan untuk melakukan prediksi, bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan nilainya (Sugiyono, 2012:29). Dalam penelitian ini, persamaan regresi dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y : Kinerja Manajerial

$\alpha$  : Konstan Atau Koefisien

$\beta_1$  : Koefisien Regresi Partisipasi Anggaran

$\beta_2$  : Koefisien Regresi Akuntansi Pertanggungjawaban

$X_1$  : Partisipasi Anggaran

$X_2$  : Akuntansi Pertanggungjawaban

$e$  : Tingkat Error

### 3.7.4 Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, jika nilai probability lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:34) menurut Sandoto (2011), dasar pengambilan keputusan untuk uji ini adalah sebagai berikut :

- a.  $H_1 : b_1 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.
- b.  $H_2 : b_2 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Pada uji ini nilai t hitung akan dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 5%. Kriteria pengambilan keputusan untuk uji ini adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima, ini berarti variabel independen tidak berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak, ini berarti bahwa variabel independen mempunyai pengaruh secara individual terhadap dependen.

#### **b. Uji Simultan (Uji F)**

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terkait (Ghozali, 2011:35). Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikan F hitung dengan ketentuan:

Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada 0,05 maka  $H_0$  ditolak, dan

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada 0,05 maka  $H_0$  diterima.

#### **c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai  $R^2$  yang kecil berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relative rendah, karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamat. Sedangkan untuk data runtun untuk waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2013 :37).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo**

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana teknis yang berada dibawah Pemerintah Kota Palopo dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Palopo. Sebagai salah satu lembaga teknis daerah dan memiliki tanggungjawab membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan dibidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang sebagai pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur Kota Palopo.

Dinas Pekerjaan Umum akan senantiasa menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Palopo. Dengan demikian pembangunan infrastruktur Kota Palopo tetap memperhatikan dan mempedomani visi dan misi kota untuk menciptakan keseimbangan kota dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur sesuai kebutuhan daerah.

##### **4.1.1 Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok yaitu merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Sedangkan berdasarkan fungsinya dinas pekerjaan umum menyelenggarakan:

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas.
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Perumusan kebijakan teknis dibidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang...
4. Pelaksanaan perencanaan terhadap pengembangan wilayah, penataan kota dan pemanfaatan lahan/ruang
5. Pelaksanaan perencanaan terhadap pemeliharaan rehabilitas pembangunan sarana dan prasarana dibidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang.
6. Pengelolaan alat berat dan pemanfaatan sarana dan prasarana dibidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang.
7. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dibidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang.
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
9. Pembinaan UPTD, dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4.1.2 Visi Dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo**

##### **a. Visi**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi. Visi dapat pula diartikan

sebagai pandangan jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawah agar eksis, intisipatif, dan inovatif.

Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo sebagai instansi teknis yang melaksanakan pembangunan daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi agar tujuan-tujuan pembangunan dapat dirumuskan dan dicapai secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan implementasi teknis pembangunan dan sebagai faktor kunci dari pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Untuk itu visi dari Dinas Pekerjaan Umum yaitu: “Terwujudnya Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dinas Pekerjaan Umum Yang Handal Berhasil Guna Serta Terwujudnya Infrastruktur Kota Yang Berkualitas”.

#### **b. Misi**

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo maka dirumuskan Misi, misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo mengidentifikasi apa dan untuk siapa organisasi serta produk teknis apa yang dihasilkan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo maka dirumuskan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas infrastruktur kota yang memadai.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemukiman dan fasilitas umum.
3. Terwujudnya kesesuaian penataan ruang dan bangunan.

### **4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo**

Untuk melakukan tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:



Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
  - a. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut
3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
  - a. Seksi Irigasi Dan Rawa
  - b. Seksi Sungai Dan Pantai
  - c. Seksi Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
4. Bidang Bina Marga
  - a. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan
  - b. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan Jalan Dan Jembatan
  - c. Seksi Pengelolaan Data, Informasi Jalan Dan Jembatan
5. Bidang Sarana Dan Prasarana Infrastruktur
  - a. Seksi Pemeliharaan Perlengkapan
  - b. Seksi Operasional Dan Penyewaan Alat
  - c. Seksi Pembekalan Dan Pergudangan
6. Bidang Penataan Ruang
  - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
  - b. Seksi Pemanfaatan Ruang
  - c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

7. Bidang Bina Jasa Konstruksi
  - a. Seksi Pengaturan
  - b. Seksi Pemberdayaan
  - c. Seksi Pengawasan
8. Bidang Cipta Karya
  - a. Seksi Bangunan Gedung Dan Prasarana Pemukiman
  - b. Seksi Jalan Lingkungan
  - c. Seksi Sanitasi
9. Kelompok Jabatan Fungsional
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berdasarkan struktur organisasi diatas, berikut dijelaskan berbagai tugas dan fungsi dari tiap-tiap bagian organisasi:

#### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman.
2. Pengkoordinasian penyelenggara urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman.
3. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan dibidang pekerjaan umum, perumahan dan pemukiman.

4. Pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman.
5. Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan.

## **2. Sekretaris**

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan. Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perencanaan pelaporan.
2. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum.
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan bidang.
4. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

### **a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian**

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.

### **b. Sub Bagian Keuangan**

Sub bagian keuangan mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, memberi tugas, mengatur mengevaluasi, dan melaporkan

urusan keuangan, kegiatan kebendaharaan dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Tindak Lanjut

Sub bagian perencanaan, evaluasi dan tindak lanjut mempunyai tugas merencanakan operasional kerja, memberikan tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dibidang penyusunan program, perencanaan dan pelaporan.

### **3. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air**

Bidang pengelolaan sumber daya air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan sumber daya air.

Adapun fungsi dari pengelolaan sumber daya air yaitu:

1. Pelaksanaan operasi pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya air.
2. Pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sumber daya air.
3. Pengendalian dan pengembangan pengelolaan sumber daya air.
4. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pengelolaan sumber daya air.
5. Pelaksanaan inventarisasi dan rekomendasi pemanfaatan sumber daya air.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

a. Seksi Irigasi Dan Rawa

seksi irigasi dan rawa mempunyai tugas pokok melakukan peyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang operasi dan pemeliharaan jaringan rigasi dan rawa.

#### b. Seksi Sungai Dan Pantai

seksi sungai dan pantai melaksanakan sebagian tugas bidang pengairan yang meliputi pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sungai dan pantai serta pengendalian banjir.

#### c. Seksi Operasi Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

seksi operasi dan pemeliharaan sumber daya air mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi pengelolaan sumber daya air.

### **4. Bidang Bina Marga**

Bidang bina marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pengendalian bidang bina marga. Adapun Fungsi Bina Marga sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang bina marga.
2. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum.
3. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non structural dalam lingkup Bidang Bina Marga.
4. Penyelenggaran evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga.

#### a. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Seksi pembangunan jalan dan jembatan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi teknik penngkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapya.

b. Seksi Pemeliharaan, Peningkatan Jalan Dan Jembatan

Seksi pemeliharaan, peningkatan jalan dan jembatan mempunyai tugas menyusun program dan kegiatan seksi pemeliharaan jembatan dan jalan, menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

c. Seksi Pengelolaan Data, Informasi Jalan Dan Jembatan

Seksi pengelolaan data, informasi jalan dan jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan lingkup jalan dan jembatan.

## **5. Bidang Sarana Dan Prasarana Infrastruktur**

Bidang sarana dan prasarana infrastruktur mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan bidang sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Seksi Pemeliharaan Perlengkapan

Seksi pemeliharaan perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana teknis kegiatan pengendalian dan pemeliharaan peralatan dan perbekalan.

b. Seksi Operasional Dan Penyewaan Alat

Seksi operasional dan penyewaan alat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan kebijakan, dan petunjuk teknis, melaksanakan pengelolaan, pengadaan, pengujian laboratorium, menyusun SOP penyewaan lingkup peralatan.

### c. Seksi Pembekalan Dan Pergudangan

Seksi pembekalan dan pergudangan mempunyai tugas melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengendalian dan pemeliharaan peralatan dan perbekalan.

## 6. Bidang Penataan Ruang

Bidang penataan ruang mempunyai fungsi melaksanakan koordinasi dan penyusunan serta pemanfaatan tata ruang serta melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan tata ruang. Fungsi bidang penataan ruang yaitu:

1. Pelaksanaan perencanaan penataan ruang wilayah kota dan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan wilayah/daerah.
2. Pelaksanaan penyusunan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan.
3. Menyusun petunjuk teknis penataan ruang.

### a. Seksi Perencanaan Tata Ruang

Seksi perencanaan tata ruang mempunyai tugas menyusun perencanaan, pembinaan dan tata ruang wilayah.

### b. Seksi Pemanfaatan Ruang

Seksi pemanfaatan ruang mempunyai tugas menghimpun, mengolah, menyiapkan memelihara, memperbaharui data dan informasi dalam rangka penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang.

### c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Seksi pengendalian pemanfaatan ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan tata ruang.

## **7. Bidang Bina Jasa Konstruksi**

Bidang bina jasa konstruksi mempunyai tugas mengkoordinasi, membina dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumberdaya dan pelayanan jasa konstruksi. Fungsi bidang bina jasa konstruksi yaitu:

1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi.
2. Penyusunan program, koordinas, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penataan dan pengaturan pengelolaan jasa konstruksi.
3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penataan kelembagaan dan pemberdayaan jasa konstruksi.
4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengawasan pengelolaan jasa konstruksi.

### **a. Seksi Pengaturan**

Seksi pengaturan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.

### **b. Seksi Pemberdayaan**

Seksi pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi.

### c. Seksi Pengawasan

Seksi pengawasan mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

## **8. Bidang Cipta Karya**

Bidang cipta karya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan membina pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman. Bidang cipta karya dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

1. Menyusun rencana kerja bidang cipta karya.
2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, perencanaan dan pembinaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, prasarana dan sarana dasar permukiman.
3. Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung.
4. Perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana dasar permukiman.
5. Pelaksanaan, pembinaan, pengawasan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung, dan prasarana dan sarana dasar permukiman.

### a. Seksi Bangunan Gedung Dan Prasarana Pemukiman

Seksi bangunan gedung dan prasarana permukiman mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi dan melaksanakan perencanaan, pengawasan dan infrastruktur permukiman.

#### b. Seksi Jalan Lingkungan

Seksi jalan lingkungan mempunyai tugas melakukan pendataan dan penyiapan administrasi teknis peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan serta bangunan pelengkapannya.

#### c. Seksi Sanitasi

Seksi sanitasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pendataan, pengkajian, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana air bersih pada perumahan dan pemukiman rawan air bersih.

### **9. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang dinas pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman. Tugas teknis operasional yang dimaksud adalah melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

#### **4.1.4 Deskripsi Data**

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo. Pada penelitian ini, penelitian mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo

sebanyak 73 kuesioner yang diberikan pada pegawai yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Jumlah kuesioner yang dikembalikan dan dapat digunakan sebanyak 55, atau tingkat pengembalian data kuesioner sebanyak 75%. Adapun rincian dapat dilihat:

**Tabel 4.1 Pengumpulan Data Primer Penelitian**

No.	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase %
1.	Distribusi kuesioner	73	100%
2.	Kuesioner kembali	55	75%
3.	Kuesioner cacat/tidak kembali	18	25%
4.	Kuesioner yang dapat diolah	55	75%
<b>N sampel yang kembali = 55</b>			
<b>Responden rate = <math>\frac{55 \times 100\%}{73}</math></b>			
<b>= 75%</b>			

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2020)

Dari 73 kuesioner yang dibagikan kepada pegawai yang kerja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo, terdapat 18 kuesioner yang cacat atau tidak kembali dikarenakan pada saat dilakukan penelitian tidak semua pegawai berada di tempat. Sebanyak 55 orang pegawai yang bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo berhasil di kumpulkan sebagai responden dalam penelitian ini. Demografi responden dapat di klasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2 Demografi Responden**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Jenis kelamin</b>		
a. Laki-laki	42	76%
b. Perempuan	13	24%
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>
<b>Tingkat pendidikan</b>		
a. SMA	37	67%
b. D3	3	5%
c. S1	13	24%
d. S2	2	4%
<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2020)

Hasil karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa responden laki-laki sebanyak 42 orang (76%) dan responden perempuan sebanyak 13 orang (24%). Hasil karakteristik responden berdasarkan pendidikan diperoleh hasil bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 37 orang (67%), tingkat pendidikan D3 sebanyak 3 orang (5%), tingkat pendidikan S1 sebanyak 13 orang (24%) dan responden dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 2 orang (4%).

**Tabel 4.3 Deskripsi Frekuensi Jawaban Responden**

<b>Variabel</b>	<b>Frekuensi</b>					<b>Total Sampel</b>
	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>RR</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>	
Partisipasi Anggaran (X <sub>1</sub> )	23	32	0	0	0	<b>55</b>
Akuntansi Pertanggungjawaban (X <sub>2</sub> )	29	26	0	0	0	
Kinerja Manajerial (Y)	22	32	1	0	0	

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa dari 55 responden untuk variabel Partisipasi Anggaran (X<sub>1</sub>) menjawab “Sangat Setuju (SS)” 23 orang,

yang menjawab “Setuju (S)” 32 orang, Akuntansi Pertanggungjawaban ( $X_2$ ) yang menjawab “Sangat Setuju (SS)” 29 orang, yang menjawab “Setuju (S)” 26 orang, dan Kinerja Manajerial (Y) yang menjawab “Sangat Setuju” (SS) 22 orang, yang menjawab “Setuju (S)” 32 orang, dan yang menjawab “Ragu-ragu (RR)” 1 orang.

## 4.2 Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas

### 4.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu indikator yang berbentuk kuesioner. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan melihat signifikan koefisien korelasi antara masing-masing indikator atau item pertanyaan terhadap total skor variabel. Data dikatakan valid jika nilai  $r_{hitung}$  yang merupakan nilai item dari *corrected Item-total correlation* > dari  $r_{tabel}$  pada signifikan 0,05. Hasil uji validitas dari masing-masing variabel di tampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Data**

Variabel	Indikator	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Keterangan
<b>Partisipasi Anggaran</b> ( $X_1$ )	X1.1	0,650	0,266	Valid
	X1.2	0,646	0,266	Valid
	X1.3	0,517	0,266	Valid
	X1.4	0,562	0,266	Valid
	X1.5	0,612	0,266	Valid
	X1.6	0,614	0,266	Valid
<b>Akuntansi</b> <b>Pertanggungjawaban</b> ( $X_2$ )	X2.1	0,629	0,266	Valid
	X2.2	0,565	0,266	Valid
	X2.3	0,453	0,266	Valid

	X2.4	0,542	0,266	Valid
	X2.5	0,509	0,266	Valid
	X2.6	0,633	0,266	Valid
	X2.7	0,597	0,266	Valid
<b>Kinerja Manajerial (Y)</b>	Y1	0,520	0,266	Valid
	Y2	0,595	0,266	Valid
	Y3	0,652	0,266	Valid
	Y4	0,650	0,266	Valid
	Y5	0,671	0,266	Valid
	Y6	0,617	0,266	Valid
	Y7	0,669	0,266	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics 23 (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas diatas dapat diketahui bahwa indikator-indikator pertanyaan dari variabel Partisipasi Anggaran ( $X_1$ ), Akuntansi Pertanggungjawaban ( $X_2$ ), Dan Kinerja manajerial (Y) yang diajukan pada responden valid karena nilai r hitung > r tabel dengan signifikan 0,05 (5%).

#### 4.2.2 Uji Reliabilitas Data

Realibilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesoiner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden terhadap pertanyaan tersebut konsisten. Nilai ketentuan untuk mengukur realibilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ). Suatu konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki *Conbach Alpha* > 0,60.

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Data

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Partisipasi Anggaran ( $X_1$ )	0,628	0,60	Reliabel
Akuntansi Pertanggungjawaban ( $X_2$ )	0,631	0,60	Reliabel
Kinerja Manajerial (Y)	0,736	0,60	Reliabel

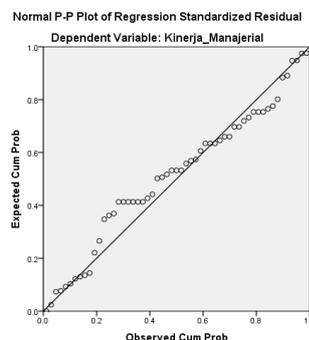
Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics 23 (2020)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 4.5 di atas disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan pada penelitian ini telah reliabel Karena secara keseluruhan variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga layak diajukan untuk diujikan ke pengujian selanjutnya.

### 4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data variabel yang diteliti mendekati populasi distribusi normal atau tidak. Untuk menguji model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak dapat dilihat dari penyebaran data (titik) pada suatu diagonal dari grafik yang bersangkutan P-Plot. Bila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normal. Grafik P-Plot dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.2 Grafik P-Plot Uji Normalitas

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics 23 (2020)

Pada gambar 4.2 Grafik P-Plot Uji Normalitas diatas, terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Sehingga gambar diatas dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hal tersebut terjadi apabila residual berasal dari distribusi yang normal, maka nilai sebesaran terletak disekitar garis lurus, sehingga dalam penelitian ini grafik p-plot uji normalitas terpenuhi.

**Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.62431794
Most Extreme Differences	Absolute	.139
	Positive	.092
	Negative	-.139
Test Statistic		.139
Asymp. Sig. (2-tailed)		.010 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics 23 (2020)

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas diketahui nilai signifikansi 0,10 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi secara normal.

#### 4.3.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (*independent*) atau tidak. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Adanya multikolonieritas dapat diketahui jika nilai *tolerance*  $>0,1$  atau sama dengan nilai VIF  $<10$ . Berikut ini hasil yang dilakukan dari uji multikolonieritas:

**Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolonieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.083	3.254		1.255	.215		
	Partisipasi_Anggaran	.172	.125	.160	1.375	.175	.613	1.631
	Akuntansi_Pertanggungjawaban	.720	.129	.646	5.567	.000	.613	1.631

a. Dependent Variable: Kinerja\_Manajerial

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics 23 (2020)

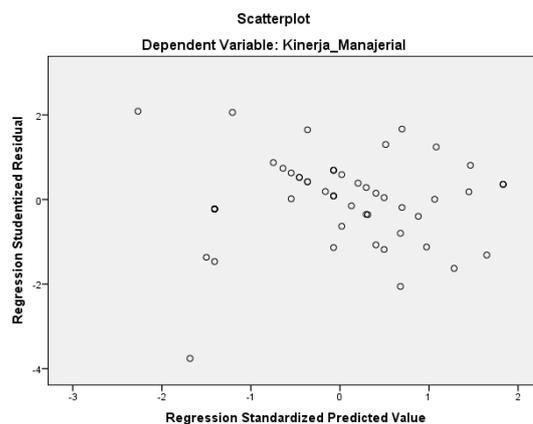
Berdasarkan hasil uji multikolonieritas yang dilakukan di atas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* yang dapat diperoleh dari masing-masing variabel adalah  $>0,1$ . Besar *tolerance* yang dimiliki oleh variabel tersebut yaitu, variabel Partisipasi Anggaran sebesar 0,613 dan variabel Akuntansi Pertanggungjawaban sebesar 0,613. Sehingga nilai tersebut dapat memenuhi syarat bahwa agar tidak terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai *tolerance* dari masing-masing variabel harus  $>0,1$ .

Sedangkan nilai *Varian Inflation Factor* (VIF) dalam penelitian ini yaitu sebesar 1,631 untuk Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban. Oleh karena itu, nilai tersebut juga telah memenuhi syarat lainnya dari uji

multikolinieritas bahwa nilai dari VIF harus  $<10$ . Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam penelitian ini.

#### 4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SREISD dan ZPRED dimana dasar analisisnya adalah: Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar kemudian menyempit maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini hasil dari uji heteroskedastisitas:



**Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics 23 (2020)

Berdasarkan tampilan pada *scatterplot* terlihat bahwa plot menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu *Regression Studentized Residual*. Oleh karena itu, berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode analisis grafik dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi

heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini. Sehingga, model regresi dalam penelitian ini layak digunakan.

Selain menggunakan grafik *scatterplot* diatas, dalam menentukan heteroskedastisitas ini juga menggunakan uji *glejser*. Dalam melaksanakan uji *glejser* diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Hasil Uji Glejser**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	4.433	2.086		2.126	.038
	Partisipasi_Anggaran	-.196	.080	-.407	-2.445	.018
	Akuntansi_Pertanggung gjawaban	.061	.083	.123	.737	.464

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics 23 (2020)

Pada tabel uji *glejser* diatas, nilai signifikan yang diperoleh dari uji tersebut untuk variabel partisipasi anggaran ( $X_1$ ) yaitu sebesar 0,018 dan uji variabel akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) sebesar 0,464. Nilai-nilai yang diperoleh oleh seluruh variabel telah memenuhi syarat statistik bahwa nilai signifikan dalam uji ini harus diatas 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

#### 4.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear berganda ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban

terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo. Hasil yang diperoleh dari proses perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.083	3.254		1.255	.215
	Partisipasi_Anggaran	.172	.125	.160	1.375	.175
	Akuntansi_Pertanggungjawaban	.720	.129	.646	5.567	.000

a. Dependent Variable: Kinerja\_Manajerial

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics 23 (2020)

Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda diatas, diperoleh koefisien variabel bebas partisipasi anggaran ( $X_1$ ) sebesar 0,172 dan koefisien variabel akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) sebesar 0,720. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 4,083 + 0,172 X_1 + 0,720 X_2 + e$$

Keterangan:

$Y$  : Kinerja Manajerial

$\beta_1$  : koefisien regresi

$\beta_2$  : koefisien regresi

$X_1$  : Partisipasi Anggaran

$X_2$  : Akuntansi Pertanggungjawaban

$e$  : Error

Persamaan regresi linear diatas dapat diketahui bahwa:

- a. Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik diatas sebesar 4,803 artinya apabila variabel bebas bernilai nol maka kinerja manajerial Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo tetap sebesar 4.803.
- b. Nilai koefisien regresi variabel partisipasi anggaran ( $X_1$ ) sebesar 0,172 menunjukkan bahwa pengaruh partisipasi anggaran ( $X_1$ ) terhadap kinerja manajerial (Y) adalah positif atau searah, artinya jika ditingkatkan variabel partisipasi anggaran sebesar satu satuan, maka kinerja instansi akan mengalami kenaikan sebesar 0,172.
- c. Nilai koefisien regresi variabel akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) sebesar 0,720 menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) terhadap kinerja manajerial (Y) adalah positif atau searah, artinya jika ditingkatkan variabel akuntansi pertanggungjawaban sebesar satu satuan, maka kinerja instansi akan mengalami kenaikan sebesar 0,720.

## 4.5 Uji Hipotesis

### 4.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen, maka di bandingkan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* ( $\alpha$ ). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 (5%). Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka hipotesis di tolak atau jika nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$

maka tidak terdapat pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat. Demikian pula sebaliknya jika signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis di terima atau jika  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka terdapat pengaruh antar variabel bebas dengan variabel terikat.

Pembuktian hipotesis secara parsial dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Sehingga dapat diketahui variabel bebas mana yang dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Untuk itu hasil uji t dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 4.10 Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.083	3.254		1.255	.215
Partisipasi_Anggaran	.172	.125	.160	1.375	.175
Akuntansi_Pertanggungjawaban	.720	.129	.646	5.567	.000

a. Dependent Variable: Kinerja\_Manajerial

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics 23 (2020)

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan di atas, diketahui nilai  $t_{tabel}$  pada nilai signifikan 0,05 (5%) memiliki persamaan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 t_{tabel} &= \alpha / 2 : n-k-1 \\
 &= 0,05 / 2 : 55-2-1 \\
 &= 0,025 : 52 \\
 &= 2,006
 \end{aligned}$$

Keterangan:

n = Jumlah

k = Jumlah Variabel Bebas

i = Konstan

Dengan ketentuan dari  $t_{\text{tabel}}$  yang ada di atas maka dilakukan perbandingan antar  $t_{\text{hitung}}$  dengan  $t_{\text{tabel}}$  pada signifikan 5% dengan asumsi sebagai berikut :

1. Jika signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis diterima
2. Jika signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak

Berdasarkan asumsi diatas hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat disimpulkan bahwa hipotesis untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

**$H_1$  : Diduga partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada dinas pekerjaan umum kota palopo**

Sesuai dengan tabel 4.10 hasil uji parsial (uji  $t$ ), dapat dilihat hasil uji parsial (uji  $t$ ) menunjukkan bahwa nilai signifikan partisipasi anggaran ( $X_1$ ) terhadap kinerja manajerial ( $Y$ ) adalah  $0,175 > 0,05$  dan nilai  $t_{\text{hitung}}$  lebih kecil dari  $t_{\text{tabel}}$  ( $1,375 < 2,006$ ) maka dari hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa  $H_1$  ditolak, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara partisipasi anggaran ( $X_1$ ) terhadap kinerja manajerial ( $Y$ ).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliasuti (2016) dimana hasil pengujiannya menunjukkan bahwa partisipasi anggaran ( $X_1$ ) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial ( $Y$ ). Hal ini disebabkan karna kurangnya partisipasi dalam penyusunan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo sehingga berdampak pada kinerja manajerial yang semakin menurun.

## **H<sub>2</sub> : Diduga akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada dinas pekerjaan umum kota palopo**

Sesuai dengan tabel 4.10 hasil uji parsial (uji t) diatas, dapat dilihat hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa nilai signifikan akuntansi pertanggungjawaban (X<sub>2</sub>) terhadap kinerja manajerial (Y) adalah  $0,000 < 0,005$  dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $5,567 > 2,006$ ) maka dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui bahwa H<sub>2</sub> diterima, artinya ada pengaruh signifikan antara akuntansi pertanggungjawaban (X<sub>2</sub>) terhadap kinerja manajerial (Y).

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliasuti (2016) dimana hasil pengujiannya menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban (X<sub>2</sub>) berpengaruh terhadap kinerja manajerial (Y). hal ini disebabkan karena instansi menerapkan akuntansi pertanggungjawaban yang baik. Diterimanya hipotesis kedua ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntansi pertanggungjawaban diinstansi terkait maka semakin baik pula kinerja dan implementasinya dalam pelayanan terhadap publik.

### **4.5.2 Uji Simultan (Uji f)**

Uji statistik f dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau independen. Hasil uji statistik f dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.11 Hasil Pengujian Simultan (Uji F)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	189.526	2	94.763	34.586	.000 <sup>b</sup>
Residual	142.474	52	2.740		
Total	332.000	54			

a. Dependent Variable: Kinerja\_Manajerial

b. Predictors: (Constant), Akuntansi\_Pertanggungjawaban, Partisipasi\_Anggaran

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics 23 (2020)

Pada tabel 4.11 diatas, dapat dilihat nilai F sebesar 34,586 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan nilai lebih kecil dari 0,05. Oleh Karen itu, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja manajerial. Dengan kata lain bahwa, partisipasi anggaran ( $X_1$ ) dan akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja manajerial ( $Y$ ). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliasuti (2016) dimana hasil pengujiannya menunjukkan bahwa partisipasi anggaran ( $X_1$ ) dan akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh terhadap kinerja manajerial ( $Y$ ).

#### **4.5.3 Uji Koefisien Determinasi adjusted $R^2$**

Uji koefisien determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil dari uji koefisien yang telah diolah:

**Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi Adjusted R<sup>2</sup>**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.756 <sup>a</sup>	.571	.554	1.655	2.161

a. Predictors: (Constant), Akuntansi\_Pertanggungjawaban, Partisipasi\_Anggaran

b. Dependent Variable: Kinerja\_Manajerial

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Statistics 23 (2020)

Berdasarkan tabel koefisien determinasi di atas, diperoleh nilai  $R^2$  (*R square*) sebesar 0,571 atau 57,1%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen (partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban) terhadap variabel independen (kinerja manajerial) sebesar 57,1%. Atau kinerja manajerial dipengaruhi oleh partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban sebesar 57,1%. Sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

#### **4.7 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.7.1 Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo**

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo. Hal ini berdasarkan dari uji parsial yang menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,172 dan memiliki nilai signifikan  $0,175 > 0,05$ . Sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliasuti (2016) dimana hasil pengujiannya menunjukkan bahwa partisipasi anggaran ( $X_1$ ) secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial (Y). Hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi dalam penyusunan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo sehingga berdampak pada kinerja manajerial yang semakin menurun.

#### **4.7.2 Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo**

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo. Hal ini berdasarkan dari uji parsial yang menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi sebesar 0,720 dan memiliki nilai signifikan  $0,000 > 0,05$ . Sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliasuti (2016) dimana hasil pengujiannya menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap kinerja manajerial (Y). Hal ini disebabkan karena instansi menerapkan akuntansi pertanggungjawaban yang baik. Diterimanya hasil analisis ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan akuntansi pertanggungjawaban diinstansi terkait maka semakin baik pula kinerja dan implementasinya dalam pelayanan terhadap publik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab IV yang menguji Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial, Dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliasius (2016) hasil pengujiannya menunjukkan bahwa partisipasi anggaran ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial (Y) dan akuntansi pertanggungjawaban ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial (Y).

#### **5.2 Keterbatasan**

Peneliti mengaku bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang ada. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Karena menggunakan kuesioner kemungkinan ada suatu respon bias dari responden yang dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain (1)

kemungkinan responden tidak menjawab secara serius atau tidak jujur, (2) kemungkinan responden tidak mengerti dengan pertanyaan yang ada di kuesioner.

2. Peneliti hanya menggunakan dua variabel independen yaitu untuk mempengaruhi kinerja manajerial.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan evaluasi dari keterbatasan yang ada atas hasil penelitian, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan sampel yang lebih banyak.
2. Pengumpulan data pada penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya sebatas penyebaran kuesioner saja tetapi dapat juga dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi, observasi serta wawancara langsung ke objek penelitian.
3. Kehadiran peneliti pada saat responden melakukan penelitian kuesioner sangat ditekankan untuk memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan di isi agar data yang diperoleh responden nantinya tidak bias dan sesuai dengan tujuan dan apa yang diharapkan dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi. 2016, Teori, Konsep Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta: Salemba Empat, Hal 277.
- Abdul, Halim, 2013, Analisis Investasi Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Arifin, Johan Dan Pertiwi, Mega Laksmitha, 2020. Determinan Kecurangan Akuntansi Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol.4 No.2. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Arno Eby Saputro, 2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Keadilan Distributif, Komitmen Organisasi, Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 7 Nomor 10. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesai (STIESIA) Surabaya.
- Bebby Natalya, dan Kusumawardani Dwi Risma Deviyanti Annisa 2016. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Pegawai. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Volume 13, (2).
- Beny Arifin W, 2012. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan System Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Akuntansi Dan Investasi Vol. 13 No. 1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Denny Andriana, Kartika Balqis, 2015. Peranan Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam Kinerja Manajer Pusat Pertanggungjawaban.
- Diana Eka Wulandari, 2016. Pengaruh Penganggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 5, Nomor 4.
- Dian Sari, 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial PT. Pos Indonesia. E-Jurnal Binat Akuntansi Vol.2 No.1
- Don, Hansen R. dan Maryanna M. Women, 2013, Akuntansi Manajerial, Edisi 8, Ahli Bahasa Deny Arnos Kwary, Salemba Empat, Jakarta.
- Dwiningwarni, Sayaketi Siundyah Dan Amrulloh, Ahmad Zuhdi, 2020. Penerapan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol.4 No.1. Universitas Darul 'Ulum Jombang.

- Eliza Farah Aini, 2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Pasuruan, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Elfa Fitrika Dewi Handayani, 2018. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Motivasi Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Erma Sarah Yuliasuti, 2016. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Asset Daerah Provinsi Jawa Tengah). Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Fadil Hanafiah Lubis, Leny Suzan, 2016. Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial, Sumatera Utara
- Febrian Pratama, 2015. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial, Skripsi, Universitas Kristen Maranatha.
- Frenni Ernis, et al, 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Motivasi. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Vol.11, No. 2.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Haryo Angkawijaya, 2016. Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial, Skripsi, Universitas Kristen Maranatha.
- Imam, Ghozali, 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kunwawiyah, Muchamad Syafruddin, (2010). Peran Variabel Komitmen Organisasi Dan Inovasi Pada Hubungan Penganggaran Dan Kinerja: Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Magelang. Jurnal Akuntansi dan Auditing Vol.7 No.1. Universitas Diponegoro.
- Nur Azizah, 2016. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol.5 No.10. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Mahoney, et.al. "Development Of Managerial Performance: A Research Approach". Cincinnati: South Western Publishing.

- M. Nafarin, 2009, Penganggaran Perusahaan, Salemba Empat Jakarta.
- Ongky Hartanto, 2016. Pengaruh *Locus Of Control*, Tekanan Anggaran Waktu Komitmen Profesional Terhadap Perilaku *Disfungsional* Auditor. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol. 20 No. 4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Lembaga Negara Republik Indoesia.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Putra, Andi Permana, 2018. Determinan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Di Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol.2 No.2.
- Rahmawati, N. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Pada Pusat Biaya Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Rivas, Veithzal, et al, 2011, Corporate Performance Management Dari Teori Ke Praktik, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Robert, Anthony N Dan Vijay Govindarajan, 2009. System Pengendalian Manajemen Jilid 1, Terjemahan F.X Kurniawan Tjakrawala, Salemba Empat, Jakarta.
- Rudianto, (2013). Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategi. Jakarta: Erlangga.
- Rudianto, (2009). Penganggaran. Jakarta: Erlangga.
- Rudianto, 2013. Akuntansi Manajemen: Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis, Erlangga, Jakarta.
- Singgih, Santoso, 2011. Buku Latihan Spss Parametric, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sugiyono, (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabet, Cv.
- Sugiyono, 2012, Statistik Untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.

Yesita Rahmawati, et al, (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial PT. KAI Persero DAOP VII Madiun. E-Jurnal Ilmiah Pendidikan Akuntansi Vol.5 No.1. Universitas PGRI Madiun

Zaeneal Fanani, 2018. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Penganggaran Dan Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Vol.2 No.3